

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
“FORMULASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN”**



**OLEH:
Dr.Ir. Aminudin Afandhi, MS
Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D
Emanuel Naitio, S.Hut**

**PROGRAM MAGISTER
PENGELOLAAN SUMBERDAYA LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul Pengabdian : Pendidikan dan Pelatihan : Formulasi Kebijakan Lingkungan

2. KetuaPelaksana

- a. Nama : Dr.Ir. Aminudin Afandhi, MS
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 195802081982121001
- d. Pangkat/Golongan : III-d
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Sedang Melakukan Pengabdian : Tidak
- g. Fakultas : Fakultas Pertanian
- h. Jurusan : Perlindungan Tanaman
- i. BidangKeahlian : Sistem Lingkungan

3. Anggota Pelaksana

3.1. Anggota Pelaksana

NO	NAMA	NIP	BIDANG KEAHLIAN
1	Amin Setyo Leksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D	197211172000121001	Entomologi/ekologi

3.2. Nama/NIM Mahasiswa yang dilibatkan

NO	NAMA	NIM
1.	Emanuel Naitio, S.Hut	146150100011026

- 4. Jangka Waktu Pengabdian : 6 (Enam) bulan
- 5. Biaya yang dibutuhkan : Rp. 15.000.000,00
- 6. Sumber Pembiayaan : PNBP

Menyetujui
Direktur Program Pascasarjana
UniversitasBrawijaya

Malang, 20 April 2015
Ketua Pelaksana

Prof.Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP.196102021985031006

Dr.Ir. Aminudin Afandhi, MS
NIP.195802081982121001

SUSUNAN TIM PELAKSANA

No	Nama/Gol./Bidang Keahlian/Instansi	Tugas Dalam Pengabdian/Jam Kerja per Bulan	Tanda Tangan Kesiediaan Aktif dalam Pengabdian
1	Dr.Ir. Aminudin Afandhi, MS/III-d/Sistem Lingkungan/FP – Universitas Brawijaya	Ketua Pelaksana: Koordinator Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Mengkoordinasi Pelaksanaan Pengabdian dan Presentasi Laporan.	
2	Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D/I V-a/Entomologi-ekologi//FMIPA – Universitas Brawijaya		

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGABDIAN

KetuaPelaksana

Nama Lengkap : Dr.Ir. AminudinAfandhi, MS
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 8 Februari 1958
JenisKelamin : Laki-laki
BidangKeahlian : SistemLingkungan

Pendidikan

No	TempatPendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	BidangStudi
1	Sarjana, FP UniversitasBrawijaya	Malang, Indonesia	1981	Perlindungananaman
2	Master, PPS InstitutPertanianBogor	Bogor, Indonesia	1987	Entomologi
3	Doktoral, UniversitasBrawijaya	Malang, Indonesia	1997	IlmuPertanian

Malang, 20 April 2015

Dr.Ir. AminudinAfandhi, MS
NIP. 195802081982121001

AnggotaPengabdian

Nama Lengkap : Amin SetyoLeksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D
Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 17 Nopember 1972
JenisKelamin : Laki-laki
BidangKeahlian : Entomologi/ekologi

Pendidikan

No	TempatPendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	BidangStudi
1	Sarjana, InstitutTeknologi Bandung	Bandung, Indonesia	1997	Biologi
2	Master, InstitutTeknologi Bandung	Bandung, Indonesia	2001	Biologi
2	Doktoral, Graduate School for International Development and Cooperation	Hiroshima, Japan	2005	Development Science

Pengabdian yang telahdilakukan

No	JudulKegiatan
1	PenyuluhandanPelatihanPemanfaatanCacingdanOrganisme Tanah LokaluntukMeningkatkanKualitasEkosistemPertanian di DesaRanupani, Lumajang, 2006
2	Upayapeningkatankalitasmatakuliahkewirausahaanuntukmahasiswakelompokagrokompleks, UniversitasBrawijaya, 2007
3	PenyuluhandanPelatihanTeknik PHT untukMendukungSistemPertanianBerkelanjutan di DesaRanup Lumajang, 2007
4	PengenalanSistemPertanianOrganikuntukMendukung Pembangunan Kawasan yang Berkesinambun (Sustainable Development) di DesaRanuPani, Lumajang, 2007
5	Peningkatanketerampilandanmotiviasiusahamelaluikegiatanmagang. 2009
6	PenyuluhanpotensiAraceaesebagaisumberglukomanandanupayakonservasilingkunganagroforestri di DesaSumberbendo, Kab. Madiun. 2010
7	PelatihanPencuplikandanPengawetanSpesimenuntukmeningkatkanPeran Guru sebagaiPeloporKonservasi Fauna. 2011
8	Pemanfaatan Flora LokaluntukMeningkatkanDiversifikasiPangandanKonservasiEkosistemPertanian Madiun. 2012

Malang, 20 April 2015

Amin SetyoLeksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D
NIP. 197211172000121001

I. JUDUL

KEBIJAKAN PUBLIK BERDIMENSI LINGKUNGAN (BASIC KEBIJAKAN PUBLIK YANG TERKAIT LINGKUNGAN)

II. ANALISIS SITUASI

Program Pascasarjana Interdisipliner Universitas Brawijaya Malang (PPSUB) sejak berdiri lima (5) tahun yang lalu masih belum memiliki Sertifikat Pendamping Ijazah (SPI). Di era kesejagatan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak saja dituntut untuk piawai menguasai satu disiplin ilmu (spesialisasi) namun lebih dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan ataupun *science* yang spesifik sekaligus mempunyai kemampuan atau kapabilitas *general*. PPSUB (interdisipliner) sudah waktunya untuk membangun insan-insan terdidik yang berasal dari berbagai disiplin ilmu secara spesifik selain memiliki kemampuan spesifik dan *general* juga diharapkan mahasiswanya setelah mengakhiri studi mempunyai kemampuan yang berbasis terapan.

Mengingat peserta didik atau mahasiswa PPSUB berasal dari berbagai disiplin ilmu dan masing-masing peserta rata-rata telah bekerja pada institusi pemerintah maupun swasta maka membekali peserta didik dengan kebijakan yang berbasis lingkungan adalah suatu keniscayaan. Ilmu kebijakan publik sendiri pada dasarnya menganut prinsip interdisipliner oleh sebab itu, membekali peserta didik dengan ilmu yang sarat nilai menjadi integrasi disiplin ilmu yang dibutuhkan kini dan masa depan.

Program Magister dan Doktor pada PPSUB yang terdiri dari Program Magister :

1. Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan (PSLP)
2. Wawasan Ketahanan Nasional (Wasantanas)
3. Studi Wanita

Sedangkan Program Doktor, Kajian Ilmu Lingkungan. Semua Program Studi tersebut sangat bersentuhan dengan *public policy* (kebijakan publik). Untuk itu sangat beralasan jika program pengabdian masyarakat PPSUB baik program studi Magister maupun Doktor pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membekali peserta didik atau alumni dengan Sertifikat Pendamping Ijazah yang berbasis kebijakan publik.

Basis peserta didik Program Magister dan Didik terdiri dari ilmuwan sosial, *science*, teknokrat serta berlatar belakang *full student*, guru, dosen, birokrat, politisi, pemerhati lingkungan dan aktivis pengelola lingkungan. Masing-masing latar belakang bidang keilmuan dan pekerjaan merupakan kekayaan tersendiri bagi institusi PPSUB maupun peserta didik. Bagi PPSUB ragam latar belakang keilmuan dapat dijadikan modal untuk lebih mengembangkan institusi yang berbasis interdisipliner. Sementara bagi peserta didik atau alumni kompleksitas latar belakang keilmuan dan profesi masing-masing peserta didik dapat saling memberi pengayaan ilmu pengetahuan, *science* atau pengalaman profesional.

Dilihat dari segi usia memang PPSUB masih relatif baru akan tetapi institusi ini diasuh oleh dosen-dosen profesional yang bergelar Doktor dan berstatus Guru Besar dengan pengalaman proses belajar mengajar yang sudah berpuluh-puluh tahun. Disamping itu para tenaga pendidik tersebut kebanyakan tidak sekedar memiliki kemampuan lokal dan nasional namun juga internasional.

Pada gilirannya peserta didik Magister maupun Doktor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri merasakan indahnya Taman Ilmu karena diasuh oleh insan-insan yang profesional dengan sangat kekeluargaan yang tinggi. Disamping itu, tenaga kependidikan yang profesional serta penuh keakraban dan kekeluargaan dengan mahasiswa masih ditunjang dengan tenaga administrasi yang cekatan dan memiliki sopan santun yang tinggi. Kedua hal tersebut masih ditunjang dengan fasilitas proses pembelajaran yang memadai serta letak strategis keberadaan PPSUB di jantung kota Malang.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Jauh sebelum ilmuwan modern berbicara tentang kebijakan publik yang sarat nilai dan atau berbasis lingkungan, didalam syariat Islam justru meletakkan sistem nilai yang berbasis tauhid niscaya mendasari seluruh sistem kehidupan manusia. Do'a yang sangat populer diabadikan di dalam Al-Quran (Surat Al Bhaqarah :) mengisyaratkan tentang dibutuhkannya nilai-nilai yang trasendental, sakral dan monumental harus selalu bersanding dengan nilai-nilai yang provan duniawi. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang Kebijakan Publik para ahli sepakat tentang nilai-nilai yang ada didalamnya. Tidak ada kebijakan publik yang tidak sarat nilai. Jika diperhatikan kehidupan masyarakat dan bangsa di dunia ini maka tidak satupun didalam sistem pergaulan sosial maupun hal-hal yang bertalian dengan kebijakan publik yang tidak menampilkan penerapan sistem nilai yang diakui dan tumbuh kembangkan oleh masyarakat dan bangsa tersebut. Sistem nilai terbaik di dunia yang telah dikristalisasi oleh *founding fathers* bangsa Indonesia antara lain Soekarno (Presiden Pertama Republik Indonesia) yaitu Pancasila. Pancasila tidak berlebihan jika disebut fondasi sistem nilai terbaik di dunia karena mewakili nilai-nilai yang mapan dan *sophisticated* yang niscaya dapat di terima oleh dunia.

Falsafah Pancasila bukan sebagai agama namun menempatkan nilai-nilai agama dan sistem kepercayaan pada garda depan setiap aktifitas manusia. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang basis kebijakan publik yang berwawasan lingkungan menempatkan nilai-nilai Pancasila adalah suatu keharusan. Nilai Pancasila yang cenderung ditinggalkan, bahkan nyaris tak pernah diperhitungkan adalah sistem nilai pada sila pertama.

Pada tataran empirik semua orang dapat membaca bahwa kebijakan publik yang diakui syaratnya namun sama sekali tidak memperhitungkan nilai-nilai agama pada saat proses pembuatan kebijakan publik. Jauh di tahun 1990-an Guru Besar Ilmu Administrasi Publik (Miftah Thoha, 1994) Universitas Gajahmada (UGM) memperingatkan tentang kelemahan kebijakan publik yang tidak menyertakan nilai-nilai keagamaan. Sementara (Indarwanto, 2011) mensaratkan bahwa setiap kebijakan publik itu niscaya selalu didasarkan pada nilai nilai Ketuhanan yang terejahwantah di dalam :

1. Keimanan
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Kebenaran
5. Kebijakan
6. Ketulusan
7. Kecintaan
8. Kekerabatan
9. Kesukuan
10. Kebangsaan
11. Kesemestaan

Pengejawantahan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 11 K tersebut jika disederhanakan maksudnya, setiap kebijakan publik hendaknya selaras dengan lingkungan yang didasari oleh nilai-nilai tersebut. Nilai nilai tersebut dalam keunggulannya masing masing tidak saja dapat diterima oleh masyarakat bangsa pada umumnya namun nilai tersebut memang milik masyarakat bangsa di dunia yang wajar dan normal. Kebijakan publik yang tanpa mengindahkan nilai Ketuhanan nyaris dapat dipastikan berujung pada kerusakan lingkungan.

Yudi Latif, 2011 mendobrak khasanah perbendaharaan kebijakan publik yang telah lama meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Yudi Latif mengelaborasi dan menganalisis secara tajam keberadaan historis filosofis Pancasila sembari dikaitkelindankan dengan perilaku politik warga negara dan *policy makers*. Di dalam analisisnya yang piawai tersebut dia mengusulkan sekaligus mengusung nilai-nilai historis dan filosofis Pancasila agar tidak

sekedar dijadikan monumen jargon namun lebih dari itu dijadikan nafas keseharian perilaku bangsa Indonesia.

Jika dipinjam analisis Indarwanto, 2011 dan Yudi Latif, 2011 sampailah pada simpul sederhana bahwa basis kebijakan publik yang berdimensi lingkungan seharusnya tidak menawar keberadaan sistem nilai Pancasila sebagai dasar proses pembuatan kebijakan publik (formulasi) yang berbasis lingkungan. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik tanpa menyertakan nilai-nilai filosofis dan pemahaman sejarah keberadaan lingkungan maka seluruh wilayah Indonesia dapat dipastikan lambat maupun cepat akan tergilas oleh keserakahan manusia.

Peringatan dari Muhammad Amien Rais, 20... yang berbicara tentang Selamatkan Indonesia mestinya menjadi salah satu buku wajib bagi seluruh pendidik (guru dan dosen) termasuk seluruh warga bangsa demi kelangsungan hidup dan terpeliharanya lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Amien Rais telah mampu membuktikan dengan analisis yang sangat piawai disertai data yang memadai serta kondisi empirik yang dapat dilihat oleh siapa pun mestinya menjadi perhatian tersendiri terutama bagi *policy holders*, *stake holders*, dan *policy makers*. Mengabaikan peringatan Amien Rais yang lugas tersebut berarti dengan sadar dan terstruktur menghendaki Indonesia yang subur tinggal menjadi kenangan pada suatu saat nanti.

Tidak ada artinya sejumlah institusi pendidikan tinggi dan pencinta lingkungan hidup yang terorganisasi serta suara ulama berbicara tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup jika tidak diikuti atau diimbangi *political will* dari pemerintah secara nyata. Untuk itu kerjasama yang terintegrasi antara berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah keniscayaan yang utama.

Sependapat dengan Treanor, 2001 bahwa untuk mewujudkan pembangunan atau kebijakan publik yang berwawasan lingkungan tidak sekedar dibutuhkannya suara mayoritas. Tidak jarang suara mayoritas yang merupakan ciri dasar demokrasi dalam memenangkan opsi kebijakan publik mencederai hati nurani rakyat. Demokrasi adalah bentuk lain dari kebohongan terstruktur yang berbasis suara mayoritas.

Pendapat ini merupakan peringatan bagi insan terdidik agar lebih mencermati serta berhati-hati ketika merekomendasikan penerapan demokrasi di bumi pertiwi. Tanpa bermaksud sekedar menghisap jempol maka jika memang harus berbicara demokrasi, Demokrasi Pancasila adalah keniscayaan untuk diterima sebagai format berbangsa dan bernegara (Soekarno, 1964 dan Latief, 2013).

Nilai nilai sakral dan ideal didalam Pancasila pasti dapat diterapkan didalam kehidupan sehari hari sebab nilai tersebut justru digali dan diambil dari nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia- bahkan nilai nilai dasar yang ada diseluruh dunia.

Ketika kita berbicara nilai didalam kebijakan publik yang berbasis lingkungan, pendekatan lintas disiplin ilmu adalah keniscayaan untuk itu parspektif hukum lingkungan harus menjadi salah satu pilar formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik (Supriadi, 2006). Tidak kalah pentingnya pendekatan yang berbasis sosiologi kesehatan lingkungan termasuk didalamnya menejemen atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menjadi keharusan untuk dijadikan penyanggah kebijakan publik (Sarudji, 2006, Mitchel, Setiawan, Hadi Rahmi, 2000, Sarudji, Ed., 2009, Soemarwoto, 1996, Dwi Susilo, 2012).

Berdasar sejumlah pendekatan teoritik tersebut jika disimpulkan bahwa kebijakan publik yang berbasis lingkungan didalamnya niscaya terdapat unsur :

1. Nilai nilai Idiologis atau Filosofis,
2. Nilai nilai kearifan lokal
3. Nilai guna spiritual dan fisik
4. Hukum lingkungan,

5. Kesehatan lingkungan,
6. Keberlangsungan flora dan fauna,
7. Keberlanjutan pembangunan yang berbasis lingkungan

Dimensi kebijakan yang nampaknya lengkap tersebut masih menyisakan permasalahan empirik namun sering kali dikatakan tidak ilmiah yaitu dimensi alam ghaib. Pada tatanan empirik saat diimplementasikan sebuah kebijakan tidak jarang dihadapkan pada masalah yang ghaib. Masalah masalah tersebut antara lain;

- a) Kesurupan massal sejumlah siswa disuatu institusi,
- b) Kesurupan massal disejumlah perusahaan,
- c) Pohon sulit ditebang saat akan memulai pembangunan
- d) Mesin produksi tidak dapat dioperasikan meskipun kondisinya baik
- e) Penampakan makhluk ghaib diruang kelas atau ruang kerja, dll

Meskipun sejumlah hal tersebut diatas tidak selalu terjadi dalam keseharian namun cukup mengganggu proses belajar mengajar maupun proses produksi termasuk didalamnya proses pelaksanaan pembangunan sarana prasarana. Oleh sebab itu sudah waktunya kebijakan publik yang berorientasi lingkungan juga menyertakan atau menghitung dimensi ghaib didalam formulasi, implementasi, dan evaluasi. Hal ini dirasa penting atau bahkan dibutuhkan jika benar benar ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.

IV. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Ketika dicermati dengan seksama sebagaimana yang terlukis di dalam latar belakang proposal ini bahwa PPSUB interdisipliner sejak berdiri sampai saat ini benar-benar belum memiliki surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Sementara ini SKPI sangat dibutuhkan sebagai salah satu piranti kompetensi bagi calon alumni atau alumni PPSUB baik program Magister maupun program Doktor. Tuntutan dunia kerja baik disektor publik koperasi maupun swasta menuntut adanya nilai lebih dari lulusan institusi pendidikan tinggi yang membekali mahasiswanya dengan SKPI. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan dunia kerja setiap lulusan perguruan tinggi memiliki kapabilitas yang tidak sekedar teoritis namun lebih dari itu juga harus mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Bertalian dengan itu masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah upaya yang niscaya dilakukan oleh PPSUB untuk mewujudkan SKPI ?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan PPSUB untuk mewujudkan SKPI ?
3. Mengapa SKPI dibutuhkan oleh calon alumni PPSUB ?

V. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini melibatkan dosen, mahasiswa dan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PPSUB untuk mewujudkan SKPI
2. Upaya PPSUB untuk mewujudkan SKPI melalui pendidikan dan latihan kebijakan publik yang berorientasi lingkungan
3. SKPI bertujuan untuk lebih membekali mahasiswa atau calon alumni agar lebih memiliki kompetensi di dunia kerja

VI. MANFAAT KEGIATAN

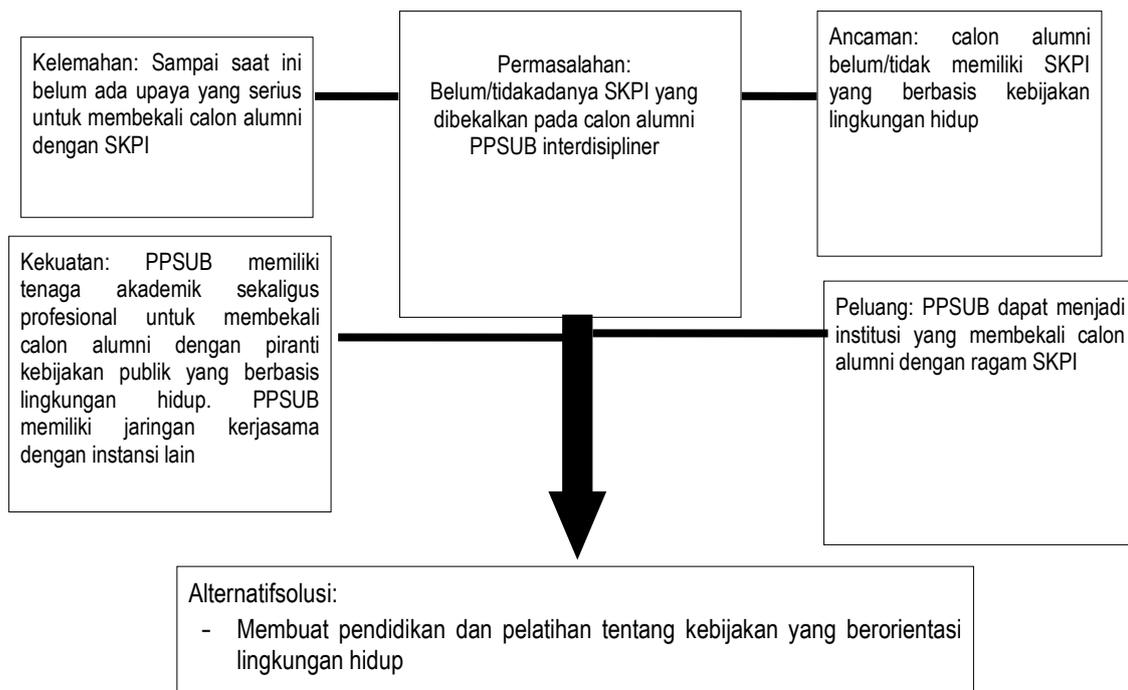
Manfaat dari kegiatan ini antara lain :

- a. Bagi calon alumni PPSUB interdisipliner :
 1. Menambah wawasan secara akademik dan praksis tentang kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan.

2. Melatih mahasiswa memiliki wawasan yang terintegrasi antara berbagai bidang ilmu untuk menganalisis kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.
 3. Membekali calon alumni agar lebih memiliki kapabilitas pemecahan masalah publik yang berorientasi ling berkelanjutan dan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)
- b. Bagi PPSUB Interdisipliner :
1. Menguatkan daya tawar pada dunia kerja baik publik, privat, maupun lainnya sehingga lebih diperhitungkan ketika persaingan institusi pendidikan tinggi kian hari semakin ketat.
 2. PPSUB lebih memiliki kewibawaan akademik dan empiris yang berhubungan dengan kebijakan publik yang berorientasi lingkungan
 3. Dapat meningkatkan martabat PPSUB dilihat dari kacamata kebijakan publik yang tertuang di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan.

VII. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Untuk memberikan kontribusi pada PPSUB khususnya calon alumni yang program studinya berorientasi pada lingkungan hidup dibekali pendidikan dan latihan analisis kebijakan yang berorientasi pada lingkungan hidup diharapkan solusi yang ditawarkan oleh calon alumni mampu memberikan jawaban sesuai yang diharapkan policy makers, policy stake holders dan masyarakat pada umumnya. Sinergi pengelola PPSUB dengan calon alumni dalam rangka mewujudkan SKPI akan memberikan bobot tambahan terhadap keberadaan alumni di pentas dunia kerja. Adapun model pemikiran sebagai kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



VIII. KHALAYAK SASARAN ANTARA

Calon alumni program Magister dan program Doktor PPSUB interdisipliner dan atau program Magister dan Doktor monodisipliner.

IX. KETERKAITAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan pengejawantahan nyata dari PPSUB interdisipliner pada calon alumni agar setelah lulus memiliki kemampuan tambahan yang positif. Pada gilirannya berbekal SKPI diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mampu membaca kemampuan, peluang dan membuat solusi terhadap permasalahan publik sehingga dapat dirumuskan menjadi kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup.

X. METODE PELAKSANAAN

1. Analisis permasalahan, kebutuhan khalayak sasaran antara, dan sumber daya yang tersedia adalah tahap awal yang dilakukan pertama kali. Selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan persiapan dan penyusunan proposal pengabdian;
2. Penyusunan materi SKPI berikut instruktur yang memiliki kapabilitas di bidang proses pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan hidup.
3. Revitalisasi kapabilitas calon alumni dengan cara melakukan pendidikan dan latihan tentang kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.
4. Bagi alumni yang mengikuti pendidikan dan penelitian kebijakan publik yang berorientasi lingkungan diberikan SKPI.
5. Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan akhir.

XI. RANCANGAN EVALUASI

Evaluasi kegiatan dilakukan pada setiap awal dan akhir proses yang dilakukan dengan cara mengkritisi materi yang diberikan pada saat pendidikan dan pelatihan, capaian yang diharapkan dari kegiatan dapat diketahui.

Capaian yang diharapkan	Kriteriakeberhasilan yang ditargetkan
Peningkatan pemahaman calon alumni terhadap kebijakan publik yang berorientasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• 90% paham terhadap kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup• 80% calon alumni mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan• 90% calon alumni paham tentang dibutuhkannya kebijakan publik yang berorientasi lingkungan
Peningkatan kualitas calon alumni terhadap pemahaman kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup	90 % peserta pendidikan dan latihan dapat mengikuti sampai paripurna
90 % mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan	90 % mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan

XII. RENCANA DAN JADWAL PENGABDIAN

Tahapankegiatan	M	A	M	J	J	A	S
Survei, penyusunanproposal dan modul/ <i>leaflet</i>	v	v	v				
Koordinasisivitas akademika JBUBdenganwargadesa			v				
Pengenalandanpenjelasankonsepdesaagroekow isata				v	v		
Evaluasikegiatan			v	v	v		
Pembuatanpresentasi&laporanakhir			v	v	V	v	v

XIII.DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Amien, M. Rais, 2010, *Selamatkan Indonesia*, PT Gramedia Jakarta
- Dunn, William, 1995, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Indarwanto, 2003, *Teori Kebijakan Publikdalam Perspektif Transendental*, Taroda, Malang.
- Islami, Moch. Irfan, 1993, *Prinsip-prinsip Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Latief, Yudhi, 2013, *Pancasila*, Jakarta.
- Mitchel, Bruce, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarudji, Didik, 2006, *Kesehatan Lingkungan*, Mitra Meraih Prestasi, Surabaya.
- Susilo, Rachmad K. Dwi, 2012, *Sosiologi Lingkungan dan SumberDaya Alam*, Ar-Ruzz Media, Jakarta
- Sarudji, Didik, 2009, *Wawasan Lingkungan*, Media Ilmu, Surabaya.
- Suratmo, F. Gunarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press
- Siregar, Doli D., 2004, *Manajemen Aset*, PT. Kresna Prima Persada, Jakarta.
- Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Treanor, Paul, 2001, *Kebohongan Demokrasi*, Istawa, Yogyakarta.

XIV.ALOKASI DAN PERINCIAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN

No	Komponen	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	<i>Honorarium</i>				
	Narasumber 1 (Prof.Dr. Abdul Hakim, M.Si)	1	OJ	1.000.000	1.000.000
	Narasumber 2 (Dr. Endah Setyowati, S.Sos.,M.Si)	1	OJ	900.000	900.000
	Narasumber 3 (Drs. Indarwanto, M.Si)	1	OJ	600.000	600.000
	Moderator	3	Orang/Kali	300.000	900.000
	Tim Pengabdian :				
	- Ketua	1	Ok	750.000	750.000
	- Anggota	2	Ok	600.000	1.200.000
	Tim Kegiatan:				
	- Kesekretariatan	1	Ok	400.000	400.000
	- Bendahara	1	Ok	400.000	400.000
	- Front desk	1	Ok	200.000	200.000
	- Sie Acara (MC)	1	Ok	200.000	200.000
	- Perlengkapan & Sound	1	Ok	200.000	200.000
	- Sie Konsumsi	1	Ok	200.000	200.000
	- Dokumentasi	1	Ok	200.000	200.000
	- Tenaga Kebersihan	3	Ok	200.000	600.000
	- Tenaga Keamanan	1	Ok	200.000	200.000
	Total 1				7.950.000
2	<i>Bahan Habis Pakai</i>				
	Bantuan transport peserta	30	ok	100.000	3.000.000
	Konsumsi	70	ok	30.000	2.100.000
	Total 2				5.100.000
3	<i>Dokumentasi, laporan dan publikasi</i>				
	ATK	1	paket	300.000	300.000
	Backdrop	1	lembar	150.000	150.000
	Sertifikat	50	lbr	5.000	250.000
	Penulisan Proposal	10	ex	45.000	450.000
	Pembuatan laporan	10	ex	80.000	800.000
	Total 3				1.950.000
	Total 1+2+3				15.000.000
					<i>(Lima belas juta rupiah)</i>

XV.LAMPIRAN

NO	MATERI	PEMATERI	MODERATOR
1	Sistem Nilai Dalam Formulasi Kebijakan Publik		
2	Isu Kebijakan Publik Dalam Nilai Ideologis		
3	Formulasi Kebijakan Publik Dalam Dimensi Lingkungan Ideologis		
4	Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Historis di Indonesia		
5	Kebijakan Publik: Antara Idealitas dengan Realitas		
6	Evaluasi Kebijakan Publik		
7	Nilai Ideologis Sebagai Standart Kebijakan Publik		
8	Hukum Positif Sebagai Standart Implementasi Kebijakan		
9	Nilai Budaya Sebagai Standart Implementasi Kebijakan		

XVI. SUSUNAN PANITIA KEGIATAN

Ketua	: Dr.Ir. Aminudin Afandhi, MS
Anggota	: 1. Amin Setyo Leksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D 2. Emanuel Naitio, S.Hut
Sekretariat	: Nia Noviana, SST
Bendahara	: Agustina Salama, S.Sos
Sie Acara	: 1. Afidatul Muji Astuti, S.Si (MC) 2. Riva Nuariska, SE (Front Desk)
Sie Perlengkapan & sound	: Zainul Arifin
Sie Konsumsi	: M. Solikin
Sie Dokumentasi	: Teguh Srianto, S.Sos
Kebersihan	: 1. Aryo Saptanto 2. Makin 3. Renaldi
Keamanan	: Samsul Arifin

SUSUNAN ACARA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015

“FORMULASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN”

Sabtu, 7 November 2015

Waktu	Acara	Penanggungjawab
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan : a. Sambutan KPS b. Sambutan Direktur c. Doa	MC
09.00 – 10.00	Formulasi Kebijakan Publik Dalam Dimensi Lingkungan Ideologis (Prof.Dr. Abdul Hakim, M.Si)	Moderator : Amin Setyo Leksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D
10.00 – 11.00	Sistem Nilai Dalam Formulasi Kebijakan Publik (Dr. Endah Setyowati, M.Si)	Moderator : Dr. Bagyo Yanuwiadi
11.00 – 12.00	Isu Kebijakan Publik Dalam Nilai Ideologis (Drs. Indarwanto, MS)	Moderator : Dr. Harsuko Riniwati, MP
12.00 – 12.15	Penutup	MC